

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dinas Sosial Kabupaten Berau merupakan instansi teknis di Kabupaten Berau yang menyelenggarakan urusan wajib sosial, sebagai upaya mendukung tercapainya Visi Kabupaten Berau seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sejalan dengan rencana pencapaian misi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Dinas Sosial memiliki peran cukup strategis dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Isu penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Berau terutama yang menjadi kewenangan Dinas Sosial adalah peningkatan keberfungsian sosial para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Berlandaskan pemikiran tersebutlah, maka Dinas Sosial Kabupaten Berau menetapkan Rencana Strategis tahun 2016-2021 yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran dan pencapaian tujuan melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan memperhatikan kecenderungan perkembangan selama kurun waktu lima tahun. Rencana Kerja tahun 2019 disusun sebagai dasar acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2019. Dengan demikian Rencana Kerja Dinas Sosial tahun 2019 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Sosial untuk tahun 2019.

2. Landasan Hukum

Adapun peraturan yang digunakan sebagai dasar hukum penyusunan Renja adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

4. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
5. Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
9. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor Tahun tentang RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021
11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016, Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Berau Nomor : 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Berau.

3. Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Sosial tahun 2019 dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Dinas Sosial berdasarkan Renstra;
2. Menjadikan Renja sebagai dokumen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun;
3. Menyelaraskan perencanaan program dan kegiatan tahunan Dinas Sosial;
4. Menyediakan informasi tentang indikator kinerja Dinas Sosial yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun 2017.

4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial tahun 2019 disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2017

1. Analisis Kinerja Output
2. Analisis Kinerja Keuangan

Bab III Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan

1. Tujuan
2. Sasaran
3. Program Kegiatan

Bab IV Penutup

Lampiran

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL
TAHUN 2017

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2017 dilakukan untuk mengetahui pencapaian kinerja Dinas Sosial tahun 2017 melalui analisis terhadap kinerja output dan kinerja keuangan. Pencapaian kinerja output akan menggambarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas, sedangkan pencapaian kinerja keuangan akan menggambarkan seberapa besar pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dalam menunjang pencapaian sasaran output.

1. Analisis Kinerja Output

Pada tahun 2017 Dinas Sosial merencanakan melaksanakan sembilan program yang tersebar dalam 34 kegiatan. Analisis kinerja akan dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat spesifik yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi SKPD, karena program dan kegiatan tersebut merupakan program dan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat pemerlu pelayanan. Adapun program dan kegiatan tersebut dapat disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel. 1

**PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL
 TAHUN 2017**

| PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA OUT PUT | | |
|---|---|----------------------------|----------------------------|
| | URAIAN | TARGET | REALISASI |
| PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | | | |
| 1. Penyediaan jasa surat menyurat. | Jumlah surat yang disediakan | 1500 Surat | 1500 Surat |
| 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 4 Jenis | 4 Jenis |
| 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan | 20 Unit (15 R.2 dan 5 R.4) | 20 Unit (15 R.2 dan 5 R.4) |
| 4. Penyediaan jasa administrasi | Jumlah jasa administrasi | 14 Orang | 14 Orang |

| | | | |
|---|---|----------------|----------------|
| keuangan | keuangan yang dibayar | | |
| 5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki | 35 Unit | 30 Unit |
| 6. Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan | 14 Jenis | 14 Jenis |
| 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah cetakan yang disediakan | 9 Jenis | 9 Jenis |
| 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah ruang yang disediakan komponen instalasi listrik | 10 Ruangan | 9 Ruangan |
| 9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan kantor | 2 Ruangan | 2 Ruangan |
| 10. Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah ruangan yang disediakan peralatan rumah tangga | 10 Ruangan | 8 Ruangan |
| 11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah buku/bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan | 1.095 Exemplar | 1.095 Exemplar |
| 12. Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah orang yang mendapat makanan dan minuman | 50 Orang | 50 Orang |
| 13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilakukan | 7 kali | 7 kali |
| 14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan | 35 kali | 33 kali |
| 15. Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran | Jumlah jasa administrasi tenaga PTT/Honorar/ Kontrak yang dibayarkan | 5 Orang | 5 Orang |
| PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR. | | | |
| 1. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor | Jumlah gedung kantor dinas sosial yang dilakukan pemeliharaan | 2 Gedung | 2 Gedung |

| | | | |
|---|---|---|---|
| <p>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN.</p> <p>1. Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD</p> | <p>Tersusunnya Renstra, Lkj-IP, dan laporan penyerapan anggaran</p> | <p>7 Dokumen</p> | <p>7 Dokumen</p> |
| <p>PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA.</p> <p>1. Pelatihan ketrampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</p> <p>2. Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM)</p> <p>3. Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Usaha Ekonomis Produktif Bagi Lansia</p> <p>4. Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga harapan (PKH)</p> | <p>Jumlah PMKS yang dilatih</p> <p>Jumlah TKSK/PSM yang mengikuti pembinaan/ pelatihan</p> <p>Jumlah Lansia kurang mampu/miskin/terlantar yang mendapat pemenuhan kebutuhan dasar/tunjangan</p> <p>Jumlah keluarga sangat miskin (KSM) yang menerima Program Keluarga harapan (PKH)</p> | <p>6 orang</p> <p>24 orang</p> <p>232 orang</p> <p>1.391 KSM</p> | <p>5 orang</p> <p>24 orang</p> <p>232 orang</p> <p>1.391 KSM</p> |
| <p>PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL.</p> <p>1. Penanganan masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan KLB</p> <p>2. Fasilitasi penyaluran dan dana Tebus Raskin</p> <p>3. Pelayanan dan perlindungan sosial bagi anak nakal</p> <p>4. Fasilitasi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)</p> | <p>Jumlah bencana dan kejadian luar biasa yang ditangani</p> <p>Jumlah Raskin/Rastra yang disalurkan dan ditebus biayanya bagi keluarga miskin</p> <p>Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum yang difasilitasi ke Panti Sosial</p> <p>Jumlah pelaksana sistem layanan dan rujukan terpadu yang difasilitasi</p> | <p>17 Kali</p> <p>6.614 KK</p> <p>7 Klien</p> <p>74 Pelaksana</p> | <p>17 Kali</p> <p>6.020 KK</p> <p>1 Klien</p> <p>74 Pelaksana</p> |

| | | | |
|--|---|---|--|
| <p>PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA.</p> <p>1. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma</p> <p>2. Pengiriman orang sakit jiwa ke RSJ dan rehab Penyandang Cacat</p> | <p>Jumlah penyandang disabilitas yang difasilitasi dalam mengikuti Diklat ketrampilan di Panti Sosial</p> <p>Jumlah klien tuna laras/penderita gangguan jiwa yang dikirim ke RSJ dan Panti Sosial Bina Laras (PSBL)</p> | <p>1 klien</p> <p>12 klien</p> | <p>- klien</p> <p>5 Klien</p> |
| <p>PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (eks narapidana, psk, narkoba dan penyakit social lainnya).</p> <p>1. Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial</p> <p>2. Pelayanan dan pemulangan orang terlantar (OT), eks napi, eks rehabilitasi PSK, gelandangan pengemis dan penyakit sosial lainnya</p> <p>3. Operasional Rumah Singgah</p> | <p>Jumlah WRSE yang difasilitasi untuk mengikuti bimbingan dan pelatihan ketrampilan berusaha di PSKW Harapan Mulia Samarinda</p> <p>Jumlah orang terlantar (OT), eks napi dan penyandang penyakit sosial lainnya yang dipulangkan ke daerah asalnya</p> <p>Jumlah orang terlantar/ tuna sosial/ PMKS yang dilayani</p> | <p>8 Orang</p> <p>35 Klien</p> <p>50 Orang</p> | <p>7 Orang</p> <p>35 Klien</p> <p>50 Orang</p> |
| <p>PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL</p> <p>1. Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan social masyarakat</p> <p>2. Operasional UPTD Pandu Gempita</p> <p>3. Kepeloporan Pahlawan dan Pembinaan Keluarga Pahlawan</p> <p>4. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)</p> | <p>Jumlah KUBE yang difasilitasi</p> <p>Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan dan Orang Tidak mampu yang terlayani</p> <p>Jumlah pelaksanaan Hari Pahlawan yg diperingati</p> <p>Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara</p> | <p>100 KUBE</p> <p>1.750 Orang</p> <p>1 Kali</p> <p>2 TMP</p> | <p>97 KUBE</p> <p>1.750 Orang</p> <p>1 Kali</p> <p>2 TMP</p> |

Ketersediaan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target tertentu sangatlah diperlukan. Besar kecilnya anggaran yang diperlukan tergantung pada seberapa besar fungsi yang dilaksanakan oleh suatu SKPD. Jika anggaran tersedia secara memadai maka target yang ingin dicapai untuk mewujudkan realisasi tertentu akan cenderung tercapai. Sebaliknya jika anggaran tidak tersedia secara memadai maka akan sulit untuk mencapai target yang diharapkan. Optimisme terhadap ketersediaan anggaran menyebabkan SKPD meningkatkan jumlah target sasaran yang ingin dicapai.

Faktor lain yang diyakini turut berpengaruh terhadap realisasi capaian kinerja pada tahun 2017 adalah faktor sumber daya manusia. Dinas Sosial merupakan dinas yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat Kabupaten. Tugas utama tersebut dilaksanakan dalam bentuk perubahan perilaku Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dari yang semula disfungsi sosial kemudian menjadi perilaku yang dapat berfungsi sosial secara optimal. Setelah para PMKS dapat berfungsi sosial secara optimal maka diberikan bantuan dalam rangka pemberdayaan ekonomi, dengan tujuan untuk mempertahankan keberfungsian sosialnya.

Untuk dapat melakukan proses perubahan perilaku dari disfungsi sosial menjadi berfungsi sosial secara optimal diperlukan pengetahuan dan keterampilan khusus dibidang ilmu kesejahteraan sosial atau profesi pekerjaan sosial. Dari 36 orang PNS Dinas Sosial hanya 7 orang yang berlatar belakang pendidikan Profesi Pekerjaan Sosial dan 2 orang yang berlatar belakang pendidikan ilmu kesejahteraan sosial, sedangkan yang lainnya berasal dari berbagai disiplin ilmu. Hal ini menyebabkan proses perubahan perilaku belum dapat dilaksanakan secara maksimal, dan pemberian bantuan modal UEP/KUBe masih harus tetap dilaksanakan sehingga masyarakat lebih mengenal Dinas Sosial sebagai instansi yang memberikan bantuan sosial.

Kurangnya sinergi antara program yang dibiayai dengan APBD dengan program-program *corporate social responsibility (CSR)* menjadi salah satu faktor yang juga turut berpengaruh. Kabupaten Berau merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi CSR cukup

besar. Jika potensi ini dikelola dengan baik dan diarahkan untuk program-program rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan dan bantuan sosial, maka kemungkinan untuk menekan angka kemiskinan sampai pada titik paling rendah akan dapat terwujud.

Berdasarkan analisis identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Berau, maka faktor kunci yang mendukung keberhasilan adalah :

1. peningkatan mutu dan jumlah sumber daya manusia (aparatur dan potensi sumber kesejahteraan sosial),
2. peningkatan sinergitas antara Dinas Sosial Kabupaten Berau dengan unit kerja penganggaran (Bappeda),
3. peningkatan kepedulian masyarakat, dunia usaha dan stakeholder terkait,
4. pemanfaatan data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) secara optimal,
5. dan komitmen pimpinan serta jajarannya dalam penanganan PMKS.

1. Analisis Kinerja Keuangan

Dinas Sosial Kabupaten Berau sebagai instansi yang melaksanakan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial secara keseluruhan telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan DPA 2017 dengan jumlah anggaran senilai Rp. 10.830.810.200,00 dengan nilai Belanja Langsung sebesar Rp. 6.582.660.200,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.248.150.000,00 yang diarahkan kepada 8 Program dan 34 Kegiatan

Secara umum target dan realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini :

Tabel.2

**TARGET DAN REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
DINAS SOSIAL TAHUN 2017**

| PROGRAM / KEGIATAN | | INDIKATOR KINERJA OUT PUT | | | |
|---|--|--|-------------|-------------|--------|
| | | URAIAN | TARGET | REALISASI | % |
| PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | | | | | |
| 1. | Penyediaan jasa surat menyurat. | Jumlah surat yang disediakan | 2.500.000 | 2.368.200 | 94,72 |
| 2. | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 64.460.000 | 34.701.164 | 53,80 |
| 3. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan | 155.512.000 | 133.240.700 | 85,67 |
| 4. | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Jumlah jasa administrasi keuangan yang dibayar | 102.768.000 | 101.643.000 | 98,90 |
| 5. | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki | 12.000.000 | 11.849.750 | 98,70 |
| 6. | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan | 10.000.000 | 8.125.600 | 81,25 |
| 7. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah cetakan yang disediakan | 12.955.000 | 12.396.600 | 95,30 |
| 8. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah ruang yang disediakan komponen instalasi listrik | 5.000.000 | 5.000.000 | 100,00 |
| 9. | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan kantor | 53.600.000 | 53.235.000 | 99,30 |
| 10. | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah ruangan yang disediakan peralatan rumah tangga | 8.500.000 | 6.196.000 | 72,80 |

| | | | | | |
|--|---|---|-------------|-------------|-------|
| 11. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah buku/bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan | 7.300.000 | 7.150.000 | 97,90 |
| 12. | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah orang yang mendapat makanan dan minuman | 5.000.000 | 5.000.000 | 100 |
| 13. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilakukan | 100.000.000 | 99.988.136 | 99,90 |
| 14. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan | 39.000.000 | 37.225.000 | 95,40 |
| 15. | Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran | Jumlah jasa administrasi tenaga PTT/Honorar/ Kontrak yang dibayarkan | 165.540.000 | 165.468.790 | 99,90 |
| PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | | | | | |
| 1. | Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor | Jumlah gedung kantor dinas sosial yang dilakukan pemeliharaan | 175.000.000 | 172.071.000 | 98,30 |
| PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN. | | | | | |
| 1. | Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD | Tersusunnya Renstra, Lkj-IP, dan laporan penyerapan anggaran | 12.273.000 | 11.415.000 | 93,00 |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA. | | | | | |
| 1. | Pelatihan ketrampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Jumlah PMKS yang dilatih | 72.500.000 | 39.013.200 | 48,20 |

| | | | | | |
|---|--|---|---------------|---------------|-------|
| 2. | Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) | Jumlah TKSK/PSM yang mengikuti pembinaan/ pelatihan | 99.000.000 | 84.170.550 | 85,00 |
| 3. | Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Usaha Ekonomis Produktif Bagi Lansia | Jumlah Lansia kurang mampu/miskin/ terlantar yang mendapat pemenuhan kebutuhan dasar/ tunjangan | 761.888.000 | 740.400.000 | 97,10 |
| 4. | Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) | Jumlah keluarga sangat miskin (KSM) yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) Rehabilitasi rumah keluarga miskin | 196.537.600 | 177.973.800 | 90,50 |
| PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL. | | | | | |
| 1. | Penanganan masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan KLB | Jumlah bencana dan kejadian luar biasa yang ditangani | 70.000.000 | 55.529.648 | 79,30 |
| 2. | Fasilitasi penyaluran dan dana Tebus Raskin | Jumlah Raskin/Rastra yang disalurkan dan ditebus biayanya bagi keluarga miskin | 2.544.520.000 | 2.470.640.415 | 97,00 |
| 3. | Pelayanan dan perlindungan sosial bagi anak nakal | Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum yang difasilitasi ke Panti Sosial | 100.000.000 | 10.823.600 | 10,80 |
| 4. | Fasilitasi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) | Jumlah pelaksana sistem layanan dan rujukan terpadu yang difasilitasi | 85.500.000 | 61.301.670 | 70,00 |

| PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA. | | | | | |
|---|---|--|-------------|-------------|-------|
| 1. | Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma | Jumlah penyandang disabilitas yang difasilitasi dalam mengikuti Diklat ketrampilan di Panti Sosial | 22.000.000 | 0 | 0,00 |
| 2. | Pengiriman orang sakit jiwa ke RSJ dan rehab paca | Jumlah klien tuna laras/penderita gangguan jiwa yg dikirim ke RSJ dan Panti Sosial Bina Laras (PSBL) | 147.160.000 | 23.994.700 | 16,30 |
| PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (eks narapidana, psk, narkoba dan penyakit sosial lainnya). | | | | | |
| 1. | Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial | Jumlah WRSE yang difasilitasi untuk mengikuti bimbingan dan pelatihan ketrampilan berusaha di PSKW Harapan Mulia Samarinda | 99.240.000 | 75.028.000 | 75,60 |
| 2. | Pelayanan dan pemulangan orang terlantar (OT), eks napi, eks rehabilitasi PSK, gelandangan pengemis dan penyakit sosial lainnya | Jumlah orang terlantar (OT), eks napi dan penyandang penyakit sosial lainnya yang dipulangkan ke daerah asalnya | 131.492.000 | 73.394.667 | 55,80 |
| 3. | Operasional Rumah Singgah | Jumlah orang terlantar/ tuna sosial/ PMKS yang dilayani | 260.000.000 | 204.120.915 | 78,50 |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL. | | | | | |
| 1. | Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan social masyarakat | Jumlah KUBE yang difasilitasi | 141.550.000 | 115.599.100 | 81,60 |
| 2. | Operasional UPTD. Pandu Gempita | Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan dan Orang Tidak mampu yang terlayani | 685.764.000 | 648.683.268 | 94,30 |

| | | | | | |
|----|--|---|-------------|-------------|-------|
| 3. | Kepeloporan Pahlawan dan pembinaan Keluarga Pahlawan | Jumlah pelaksanaan Hari Pahlawan yg diperingati | 152.310.000 | 147.787.000 | 97,00 |
| 4. | Pemeliharaan taman Makam Pahlawan (TMP) | Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara | 79.750.000 | 74.765.000 | 93,70 |

Pada tahun 2016 ini total realisasi belanja langsung sebesar Rp.9.289.620.765,00,- atau sebesar 64,83% dari anggaran belanja langsung. Pada tahun 2015 realisasi penyerapan anggaran belanja langsung sebesar 64,06% sedangkan pada tahun 2014 realisasi penyerapan anggaran belanja langsung sebesar 62,58%. Dengan demikian realisasi penyerapan anggaran belanja langsung dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan.

Realisasi penyerapan anggaran sebesar 64,83 % menunjukkan bahwa Dinas Sosial belum maksimal dalam mengelola anggaran yang ada sehingga semua program kegiatan mengalami SiLPA. Hal tersebut disebabkan oleh:

1. belum optimalnya kapasitas pengendalian dan evaluasi hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan,
2. lemahnya koordinasi lintas sektor terhadap pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS),
3. belum optimalnya sinergitas program-program penyelenggaraan kesejahteraan sosial,
4. dan kurangnya jumlah personil sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam pelayanan kesejahteraan sosial yang professional.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

1. TUJUAN

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial, diharapkan untuk sisa waktu ke depan dari lima tahun perencanaan (2016 – 2021) dapat :

1. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan terpadu kesejahteraan sosial.
4. Meningkatkan keberfungsian sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara berkesinambungan.
6. Meningkatkan pelestarian nilai-nilai kejuangan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.
7. Tersedianya sarana dan prasarana kesejahteraan sosial.

2. SASARAN

Sesuai dengan tujuan maka sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Berau yang ditetapkan, yakni :

1. Terwujudnya peningkatan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
2. Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
3. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan terpadu kesejahteraan sosial;
4. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial;

5. Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
6. Terwujudnya peningkatan pelestarian nilai-nilai kejuangan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
7. Terwujudnya sarana dan prasarana kesejahteraan sosial.

3. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019

Rencana Kerja Tahun 2019 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis pada tahun 2018. Rencana pencapaian target Renstra tersebut tergambar dari indikator kinerja sasaran dari Renstra 2016-2021 dan target indikator kinerja kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 sebagaimana lampiran 1 (Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2019), lampiran 2 (Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020), dan lampiran 3 (Rencana Kerja Anggaran Pendahuluan Tahun Anggaran 2019).

BAB IV

PENUTUP

Dokumen RENJA menjadi elemen penting dalam sebuah kegiatan perencanaan karena dokumen tersebut berisi tentang rencana kegiatan dan target yang ingin dicapai pada tahun berkenaan. Melihat pada sifatnya, Renja merupakan dokumen perencanaan jangka pendek yang bersifat operasional. Hal ini ditandai dengan dituangkannya lokasi, sasaran dan indikator kinerja out put dan out come dari setiap kegiatan. Selain itu juga memuat tentang Pagu Indikatif yang mungkin dapat disediakan untuk melaksanakan kegiatan.

Akhirnya semoga Dokumen Renja tahun 2019 ini dapat memberikan arahan yang jelas tentang apa yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Dukungan dalam hal penganggaran sangat diharapkan sehingga capaian target yang telah ditentukan dapat terwujud.

Plt. Kepala Dinas Sosial,

Hj. SUYANTI, S.Pd, M.Pd.
NIP. 19631005 198602 2 005

**RENJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU
TAHUN ANGGARAN 2020**

| Kode | | | | | | Urusan/Bidang Urusan pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | Pagu Indikatif (2020) | | Prakiraan Maju (2021) | Jenis Program dan Kegiatan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|----|---|----|---|----|---|--|----------------------------|---|---|--------|-----------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|--|-------------|
| | | | | | | | | | | Program/Outcome | | Kegiatan/Output | | Kegiatan | Program | | | | |
| | | | | | | | | | | Uraian | Target | Uraian | Target | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | | |
| 1 | 06 | 1 | 06 | 1 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | Terlayannya administrasi Perkantoran Dinas Sosial Kabupaten Berau | 100% | | | | Pelayanan Administrasi Perkantoran | | Pelayanan Administrasi Perkantoran | | |
| 1 | 06 | 1 | 06 | 1 | 01 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | Jasa surat menyurat | Kabupaten Berau | | | Jumlah surat yang disediakan | surat | 2.500.000 | | 2.750.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Sekretariat |
| 1 | 06 | 1 | 06 | 1 | 01 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Perengkapan kantor | Kabupaten Berau | | | Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar | 5 Jenis | 80.000.000 | | 88.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Sekretariat |
| 1 | 06 | 1 | 06 | 1 | 01 | 06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | | Kendaraan dinas/operasional | Kabupaten Berau | | | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan/perizinan | 14 unit | 125.000.000 | | 137.500.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Sekretariat |
| 1 | 06 | 1 | 06 | 1 | 01 | 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | | Aparatur penanggungjawab pengelola keuangan | Kabupaten Berau | | | Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayar | 12 org | 110.000.000 | | 121.000.000 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Sekretariat |
| 1 | 06 | 1 | 06 | 1 | 01 | 08 | Penyediaan Jasa Kebersihan kantor | | Kebersihan Kantor | Kabupaten Berau | | | Jumlah Luasan Kantor yang dibersihkan | 1.000 M3 | 15.000.000 | | 16.500.000 | Penyediaan Jasa Kebersihan kantor | Sekretariat |
| 1 | 06 | 1 | 06 | 1 | 01 | 09 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | | Peralatan kerja | Kabupaten Berau | | | Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki | 10 Jenis | 15.000.000 | | 16.500.000 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Sekretariat |
| 1 | 06 | 1 | 06 | 1 | 01 | 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | | Alat tulis kantor | Kabupaten Berau | | | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan | 22 Jenis | 20.000.000 | | 22.000.000 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Sekretariat |
| 1 | 06 | 1 | 06 | 1 | 01 | 11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | Barang Cetak dan Penggandaan | Kabupaten Berau | | | Jumlah barang cetakan yang disediakan | 10 Jenis | 15.000.000 | | 16.500.000 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Sekretariat |
| 1 | 06 | 1 | 06 | 1 | 01 | 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | Penyediaan komponen instalasi listrik | Kabupaten Berau | | | Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan | 10 Unit komponen | 10.000.000 | | 11.000.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Sekretariat |
| 1 | 06 | 1 | 06 | 1 | 01 | 13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Peralatan dan perlengkapan | Kabupaten Berau | | | Jumlah ruangan yang disediakan peralatan / perlengkapan kantor | 4 Ruangan | 25.000.000 | | 27.500.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Sekretariat |
| 1 | 06 | 1 | 06 | 1 | 01 | 14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | Peralatan rumah tangga | Kabupaten Berau | | | Jumlah ruangan yang disediakan peralatan rumah tangga | 15 jenis | 10.000.000 | | 11.000.000 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Sekretariat |
| 1 | 06 | 1 | 06 | 1 | 01 | 15 | Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan | | Bahan bacaan (koran) | Kabupaten Berau | | | Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan | 1.825 eksemplar | 15.000.000 | | 16.500.000 | Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan | Sekretariat |
| 1 | 06 | 1 | 06 | 1 | 01 | 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | | Aparatur dan tamu | Kabupaten Berau | | | Jumlah orang yang mendapat makanan dan minuman | 12 Bulan | 30.000.000 | | 33.000.000 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Sekretariat |
| 1 | 06 | 1 | 06 | 1 | 01 | 18 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | | Aparatur & Kegiatan dinas sosial | Kabupaten Berau | | | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan | 12 Bulan | 150.000.000 | | 165.000.000 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Sekretariat |
| 1 | 06 | 1 | 06 | 1 | 01 | 19 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah | | Aparatur & Kegiatan dinas sosial | Kabupaten Berau | | | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan | 12 Bulan | 75.000.000 | | 82.500.000 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah | Sekretariat |
| 1 | 06 | 1 | 06 | 1 | 01 | 20 | Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Perkantoran | | Tenaga PTT/Kontrak | Kabupaten Berau | | | Jumlah jasa administrasi tenaga PTT/Honorir/Kontrak yang dibayarkan | 5 orang | 175.000.000 | | 192.500.000 | Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Perkantoran | Sekretariat |
| 1 | 06 | 1 | 06 | 1 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | Terlaksananya peningkatan sarana prasarana aparatur | 100% | | | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | |
| 1 | 06 | 1 | 06 | 1 | 02 | 10 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | | Gedung Kantor | Kabupaten Berau | | | Jumlah gedung kantor yang disediakan kelengkapannya | 4 Unit | 25.000.000 | | 37.500.000 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Sekretariat |
| 1 | 06 | 1 | 06 | 1 | 02 | 22 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | | Gedung Kantor | Kabupaten Berau | | | Jumlah gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan | 2 Gedung | 50.000.000 | | 55.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Sekretariat |
| 1 | 06 | 1 | 06 | 1 | 02 | 31 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | | Aparatur Dinas Sosial | Kabupaten Berau | | | Jumlah ASN yang mengikuti Diklat | 3 Personil | 30.000.000 | | 33.000.000 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Sekretariat |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|---|----|---|----|----|--|--|--|-----------------|--|-------------|--|----------------|----------------------|--|----------------------|--|---------------------|
| 1 | 06 | 1 | 06 | 1 | 20 | | Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Napi,PSK,Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) | | | | Terlaksananya pembinaan eks. Penyandang penyakit sosial (eks. Napi,PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) | 90% | | | | Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks.napi,PSK,Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) | | Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks.napi,PSK,Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) | |
| 1 | 06 | 1 | 06 | 1 | 20 | 06 | Pelayanan dan pemulangan orang terlarang (OT),eks napi, eks rehabilitasi PSK, gelandangan pengemis dan penyakit sosial lainnya | | Orang terlarang,eks napi, gepeng dan penyakit sosial lainnya | Kabupaten Berau | | | Jumlah Orang terlarang,eks napi, gepeng dan penyakit sosial lainnya yang diberikan pelayanan | 37 Orang | 125.000.000 | | 137.500.000 | Pelayanan dan pemulangan orang terlarang (OT),eks napi, eks rehabilitasi PSK, gelandangan pengemis dan penyakit sosial lainnya | Rehsos |
| 1 | 06 | 1 | 06 | 1 | 20 | 07 | Operasional Rumah Singgah | | Warga Miskin | Kabupaten Berau | | | Jumlah warga miskin yang diberikan pelayanan | 50 Klien | 250.000.000 | | 275.000.000 | Operasional Rumah Singgah | Dayasos |
| 1 | 06 | 1 | 06 | 1 | 21 | | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | | | | Terbangunnya model kebijakan, strategi dan program pelayanan terpadu dan gerakan masyarakat peduli kabupaten sejahtera | 2.750 Orang | | | | Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | | Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | |
| 1 | 06 | 1 | 06 | 1 | 21 | 01 | Penjaringan Orsos, Karang Taruna dan PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) Berprestasi | | Orsos, Krg. Taruna dan PSM | Kabupaten Berau | | | Jumlah Orsos, Karang Taruna dan PSM berprestasi yang didata | 9 Orsos/KT/PSM | 100.000.000 | | 110.000.000 | Penjaringan Orsos, Karang Taruna dan PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) Berprestasi | Dayasos |
| 1 | 06 | 1 | 06 | 1 | 21 | 02 | Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat | | Warga Miskin | Kabupaten Berau | | | Jumlah KUBE yang dimonitor | 100 KUBE | 125.000.000 | | 137.500.000 | Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat | Dayasos |
| 1 | 06 | 1 | 06 | 1 | 21 | 06 | Operasional UPTD. Pandu Gempita (Pelayanan Terpadu Gerakan Masyarakat Peduli) | | Warga Miskin | Kabupaten Berau | | | Jumlah warga miskin yang diberikan pelayanan | 2.650 Orang | 400.000.000 | | 440.000.000 | Operasional UPTD. (Pelayanan Terpadu Gerakan Masyarakat Peduli) | UPTD. Pandu Gempita |
| 1 | 06 | 1 | 06 | 1 | 21 | 07 | Kepeloporan Pahlawan dan Pembinaan Keluarga Pahlawan | | Veteran | Kabupaten Berau | | | Jumlah veteran/istri veteran yang diberikan santunan serta seminar yang akan dilaksanakan | 3 Kegiatan | 321.500.000 | | 353.650.000 | Kepeloporan Pahlawan dan Pembinaan Keluarga Pahlawan | Linjamsos |
| 1 | 06 | 1 | 06 | 1 | 21 | 08 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan | | TMP | Kabupaten Berau | | | Jumlah TMP yang diberikan perawatan/ pemeliharaan | 2 TMP | 200.000.000 | | 220.000.000 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan | Linjamsos |
| Total Anggaran | | | | | | | | | | | | | | - | 5.994.000.000 | | 6.603.400.000 | | |

Tanjung Redeb, Februari 2019

Kepala Dinas,

Hi. Sri Eka Takariyati, SH, MM.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19631005 198602 2 005